

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 – 2022

Adelina F. Sianturi¹ Joko Suharianto² Mita Dewi Nasution³ Tuti Yani⁴

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: Fransiskaadelina3@gmail.com¹ djoko@unimed.ac.id² mitadewinasution@gmail.com³
yantituti278@gmail.com⁴

Abstrak

Kabupaten Nias Barat merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera Utara. Dalam upaya mengurangi kemiskinan di suatu daerah, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing melalui otonomi daerah. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemiskinan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan jenis data time series yang bersumber dari BPS. Berdasarkan pengujian menggunakan model regresi diketahui bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai t-statistic sebesar 0.729042 dan nilai probability sebesar $0.4868 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan dimana H_1 ditolak. Variabel dana alokasi umum memiliki nilai t-statistic sebesar -1.696930 dan nilai probability sebesar $0.1281 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum memiliki hubungan yang negatif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemiskinan. Maka dari itu H_2 ditolak.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Kemiskinan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

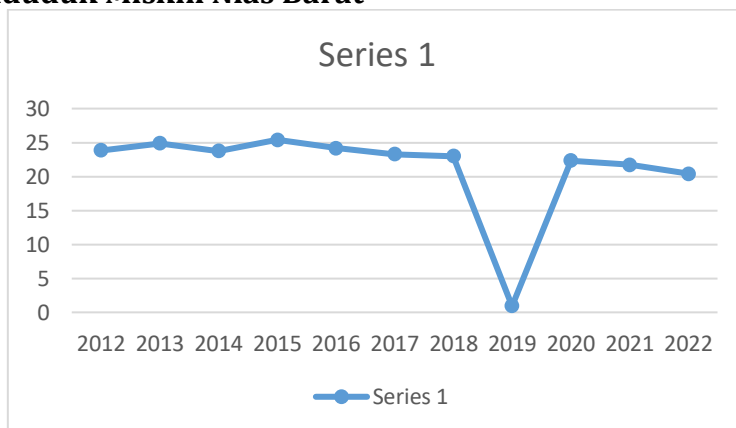
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 38 provinsi yang tiap-tiap provinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah juga berbeda-beda. Berbicara mengenai kemiskinan, sejak merdekanya Indonesia masalah ini terus menjadi persoalan yang terus berlanjut dan menjadi pusat perhatian pemerintah sampai sekarang ini. Adam Smith (1776) “tidak ada masyarakat yang makmur dan bahagia, jika sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan dan kesengsaraan”. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan penduduk miskin paling tinggi di pulau Sumatera dan merupakan tertinggi keempat di Indonesia tahun 2021. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin seperti upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Terdapat banyak penelitian yang mengangkat isu mengenai kemiskinan namun penggunaan kata ‘kesejahteraan ekonomi’ diberbagai penelitian/literatur mengenai kemiskinan di negara berkembang lebih banyak ditemukan (Lipton & Ravallion, 1995). Menurut Supriatna (2011 : 90) “kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Ada beberapa faktor yang dapat menjadikan suatu penduduk dikatakan miskin yaitu rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan, produktivitas tenaga kerja dan kesejahteraan hidup yang masih kurang baik. Berdasarkan data BPS, Nias Barat merupakan kabupaten/kota tertinggi dengan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara yaitu mencapai 26,42 % kemudian diikuti oleh Kabupaten Nias Utara sebesar 25,66 %.

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Miskin di kabupaten Nias Barat

Tahun	Jumlah penduduk miskin (dalam ribu)	Tahun	Jumlah penduduk miskin (dalam ribu)
2012	23,84	2018	23,00
2013	24,88	2019	22,08
2014	23,76	2020	22,33
2015	25,41	2021	21,75
2016	24,16	2022	20,42
2017	23,30		

Sumber Data: BPS

Grafik Jumlah Penduduk Miskin Nias Barat



Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten nias barat berada pada tingkat tertinggi di tahun 2015 yaitu sebesar 25,41 ribu jiwa kemudian terjadi penurunan pada tahun 2016 menjadi 24,16 ribu jiwa. Dan terus mengalami penurunan hingga ke tahun 2022.

Faktor- faktor yang mempengaruhi kemiskinan

Isdijoyo (2010) membedakan penyebab kemiskinan di desa dan di kota . kemiskinan di di desa disebabkan oleh: Ketidakberdayaan, sehingga kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya harga produk yang dihasilkan dan tingginya biaya hidup. Keterkucilan, sulitnya transportasi, rendahnya tingkat pendidikan. Kemiskinan materi akibat kurangnya modal dan minimnya lahan pertanian sehingga pendapatan mereka lebih rendah. Kerentanan dalam mendapatkan pekerjaan. Sedangkan penyebab kemiskinan di kota disebabkan oleh faktor ketidakberdayaan di kota akibat kurangnya lapangan pekerjaan dan tingginya biaya hidup. Sen Todaro (2003) menyatakan bahwa “pendidikan merupakan faktor penting dalam upaya mengurangi kemiskinan” dikarenakan pendidikan memainkan peran dalam membentuk kemampuan masyarakat dalam menyerap pengetahuan serta wawasan mengenai penggunaan teknologi modern dalam mengembangkan kapasitas serta kompetensi.

Secara teoritik, ada banyak pendekatan dalam upaya mengurangi kemiskinan pada suatu wilayah. Terdapat dua pendekatan yaitu melalui pendekatan neo-klasik dan pendekatan welfare economics. Pendekatan neoklasik mengatakan bahwa investasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi, diharapkan terjadi penyerapan tenaga kerja sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan otomatis berdampak terhadap pengurangan angka kemiskinan. Pada pendekatan welfare economics dikatakan bahwa pengurangan tingkat kemiskinan dapat dicapai melalui kebijakan pemerintah yaitu kebijakan transfer antar berbagai tingkat pemerintahan. Sehingga dari konteks pendekatan ini dapat diketahui bahwa konsep desentralisasi diperlukan. Desentralisasi fiskal ini merupakan kewenangan daerah didalam mengatur dan mengelola sendiri keuangan antar daerahnya dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan. Pemerintah pusat dengan kebijakannya telah memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Menurut Hastuti (2018) desentralisasi fiskal merupakan sebuah instrumen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah dapat mengatur keuangannya sendiri sehingga mengurangi akuntabilitas, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, mengurangi ketimpangan antar daerah, serta demi kesejahteraan masyarakat (Hastuti, 2018). Melalui dana desa dan pengalokasian dana alokasi umum yang optimal dapat digunakan pemerintah daerah dalam membangun dan mendanai berbagai infrastruktur seperti sekolah-sekolah, rumah sakit, jalan, dan masih banyak lagi yang dapat mengembangkan potensi di dalam daerah tersebut.

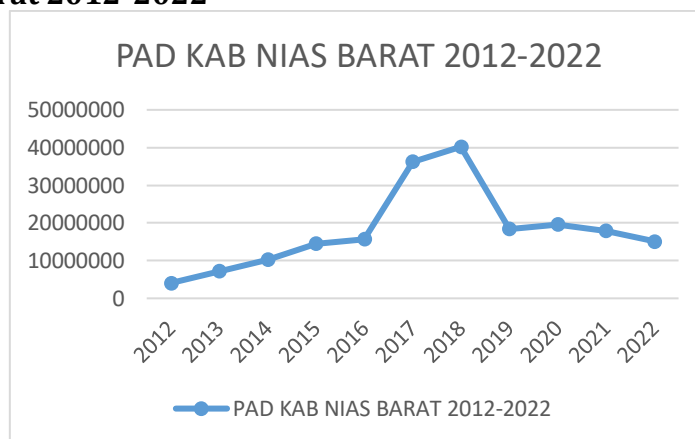
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 PAD adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna membiayai biaya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Tabel 2. Data jumlah Pendapatan Asli Daerah Kab. Nias Barat

Tahun	Jumlah PAD (000 rupiah) X1	Tahun	Jumlah PAD (000 rupiah) X1
2012	4067651	2018	40193008
2013	7223691	2019	18411236
2014	10298059	2020	19578220
2015	14492750	2021	17942258
2016	15711221	2022	15062100
2017	36239997		

Grafik PAD Nias Barat 2012-2022



Berdasarkan tabel data dan grafik diatas dapat kita lihat bahwa jumlah PAD kab nias barat berada pada tingkat tertinggi di tahun 2017 dan 2018 dengan puncak tertinggi nya pada tahun 2018 yaitu sebesar 40193008. Kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 18411236. PAD kab nias yang paling rendah dari tahun 2012-2022 yaitu di tahun 2012 sebesar 4067651. Secara logis pendapatan asli daerah berkaitan dengan kemiskinan, dimana ketika terjadi peningkatan PAD maka pemerintah daerah akan lebih banyak mengalokasikan anggaran pada program-program penanggulangan kemsiknan, seperti bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah dapat memberdayakan sektor ekonomi lokal seperti pertanian dan usaha mkro. Kemudian dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja,

Dana Alokasi Umum (DAU)

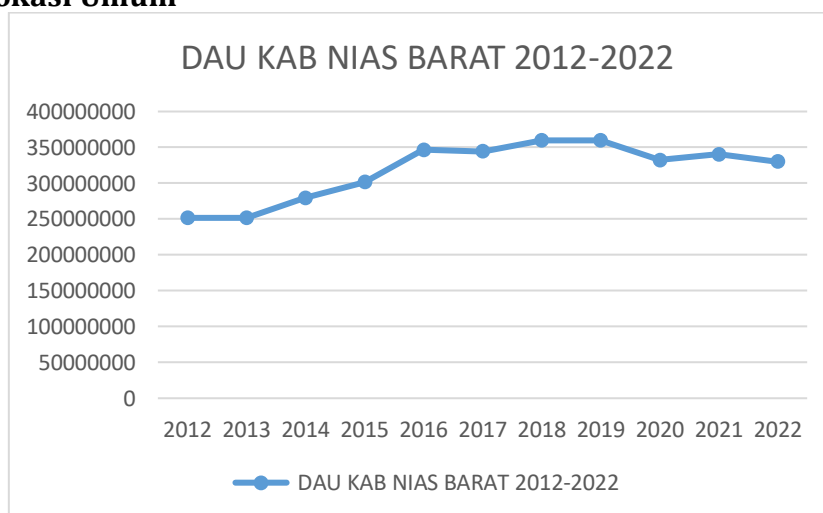
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antarDaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tabel 3. Data jumlah Dana Alokasi Umum Kab. Nias Barat

Tahun	Jumlah DAU (000 rupiah) X2	Tahun	Jumlah DAU (000 rupiah) X2
2012	251631634	2018	359696030
2013	251631634	2019	359696030
2014	279674672	2020	332435947
2015	301537799	2021	340435104
2016	346451709	2022	330192600
2017	344492409		

Sumber data: BPS

Grafik Dana Alokasi Umum



Berdasarkan tabel data dan grafik dana alokasi umum diatas dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan besaran dana alokasi umum kab Nias Barat dari tahun 2012 -2019. paling tinggi ditahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 359696030 dari tahun sebelumnya yaitu di tahun 2017 sebesar 344492409. Terjadi kenaikan sebesar 325246790 dari tahun 2017 ke 2018. Namun di tahun 2020 besarnya DAU menurun menjadi 332435947. Dana alokasi umum yang terendah dari tahun 2012-2022 jatuh Pada tahun 2012 dan 2013 yaitu sebesar 251631634. Secara logis dana alokasi umum ini berpengaruh terhadap kemiskinan dimana DAU berfokus pada retribusi pemerintah pusat ke daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Jika DAU dikelola dengan baik dan dialokasikan untuk program-program yang efektif seperti peningkatan infrastruktur dan akses pendidikan maka dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan. DAU yang disalurkan dengan transparan dan efisien dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditingkat lokal, mencptakan lapangan kerja dan meningkatkan akses kelayanan dasar yang dapat mengurangi kemiskinan.

Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2004:94), pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungt berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut

Carunia (2017 :119), PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Mardiasmo (2002) "PAD dinyatakan sebagai penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi suatu daerah, hasil pengelolaan kekayaan suatu daerah yang dipisahkan dan lain-lain". Sumber-sumber pendapatan menurut Abdul Halim (2004:94) dibagi menjadi 4 yaitu: Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Kementrian keuangan (2018) Dana Alokasi Umum menunjukkan salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah kepada pemerintah suatu daerah yang berpenghasilan dari pendapatan Anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam pasal 27, dinyatakan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum terdiri dari: dana alokasi umum untuk provinsi dan dana alokasi umum untuk kabupaten/ kota.

Kemiskinan

Menurut BPS (2015) kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Menurut Supriatna (2011 : 90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Bank Dunia (2000) mengartikan bahwa kemiskinan adalah kekurangan, yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan. Nimietz (2011) mendefinisikan kemiskinan yaitu merupakan ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan, pakaian, dan papan. Supriyatna (1997, dikutip dalam Kadji 2012) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi seseorang dalam segala keterbatasan yang diluar dari kehendaknya. Dalam Todaro & Smith (2014), kemiskinan absolut didefinisikan sebagai sebuah keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Penelitian Terdahulu Dan Hipotesis

Terdapat banyak penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemiskinan. Seperti penelitian Marianus & Badrudin (2016) yang menghasilkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian diikuti oleh penelitian Paat et al. (2017) dengan hasil penelitian yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penelitian. Penelitian lain yang bertolak belakang dengan penelitian- penelitin tersebut yaitu penelitian Kadafi & Murtala (2020) mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2010-2017 dengan hasil yaitu tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

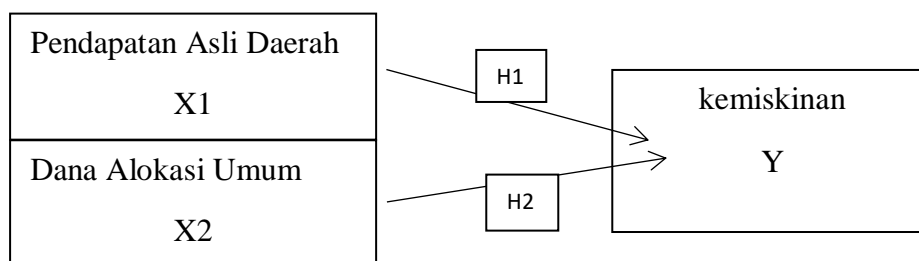
Kemudian penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengaruh dana alokasi umum terhadap kemiskinan berpengaruh signifikan yaitu penelitian Syahidin dan Abd. Jalil (2020) dengan objek penelitian yaitu kabupaten Aceh Tengah, kemudian penelitian Paseki et. Al (2014) yang membahas mengenai pengaruh dana alokasi umum dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di kota Manado Tahun 2004-2012 dengan hasil bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh secara langsung terhadap penurunan kemiskinan di kota Manado. Namun ada penelitian yang bertolak belakang yaitu

penelitian Bawimbang et.al (2021) yang menganalisis pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemiskinan di kota manado. Kemudian penelitian Istimal (2012) tentang dampak DAU terhadap kemiskinan di kota Tangerang. Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

Kerangka Konseptual



Gambar 1

METODE PENELITIAN

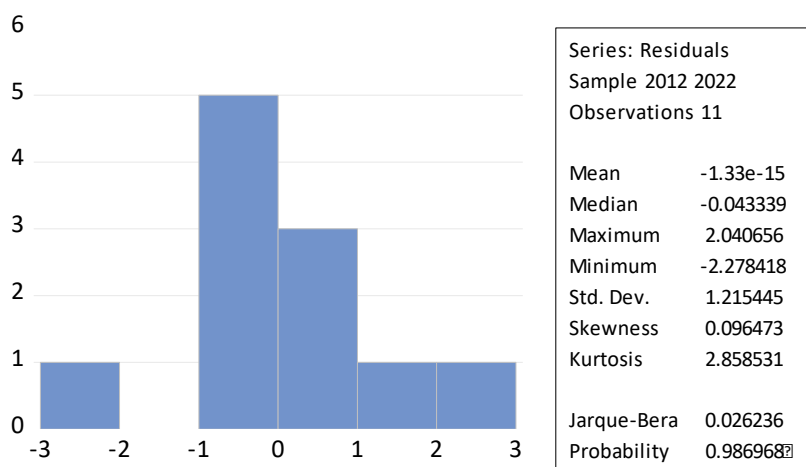
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan jenis data time series. Data tersebut berupa data historical angka kemiskinan kab Nias Barat tahun 2012-2022. Laporan realisasi Anggaran pendapatan dan belanja daerah kab Nias Barat tahun 2012-2022. Dan laporan dana alokasi umum kab Nias Barat 2012-2022 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini didasarkan pada analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif berdasarkan pada studi literatur seperti buku, artikel dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan kemiskinan, PAD, dan DAU. Sedangkan dalam analisis kuantitatifnya menggunakan model ekonometrika dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi linier berganda yang merupakan alat ukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan juga menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2010: 96). Penelitian ini terdiri dari 2 variabel independen (pendapatan asli daerah, dana alokasi umum) dan satu variabel dependen (kemiskinan), sehingga menggunakan persamaan regresi berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan jumlah kemiskinan Kabupaten Nias Barat Tahun 2012-2022

Nias Barat			
Tahun	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Dana Alokasi Umum (X2)	Kemiskinan (Y)
2012	4067651	227860872	23,84
2013	72223691	251631634	24,88
2014	10298059	279674672	23,76
2015	14492750	301537799	25,41
2016	15711221	346451709	24,16
2017	36239997	344492409	23,30
2018	40193008	359696030	23,00
2019	18411236	359696030	23,08
2020	19578220	332435947	22,33
2021	17942258	340435104	21,75
2022	15062100	330192600	20,42

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas



Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai Probability Jarque-Bera sebesar 0.026236 serta probability sebesar 0.986968 (>0.05) maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal (lolos uji normalitas).

Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors			
Date: 11/29/23 Time: 21:07			
Sample: 2012 2022			
Included observations: 11			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	14.62635	87.12601	NA
DAU	2.04E-16	123.5857	2.219618
PAD	3.35E-15	8.765281	2.219618

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai VIF variabel independen DAU sebesar 2.219618 <10.00 dan nilai VIF variabel independen PAD yaitu sebesar 2.219618 maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji multikolinieritas sudah terpenuhi atau lolos uji multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	0.952267	Prob. F(2,8)	0.4256
Obs*R-squared	2.115180	Prob. Chi-Square(2)	0.3473
Scaled explained SS	1.039637	Prob. Chi-Square(2)	0.5946

Berdasarkan hasil regresi diketahui nilai probability obs*R-Squared sebesar 0.3473 (>0.05) maka dapat disimpulkan bahwa uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi atau sudah lolos uji heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	2.660218	Prob. F(2,6)	0.1489
Obs*R-squared	5.169836	Prob. Chi-Square(2)	0.0754

Berdasarkan hasil regresi diketahui nilai probability obs*R-Squared sebesar 0.0754 (>0.05) maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji autokorelasi.

Hasil Uji T dan Uji F

Dependent Variable: KEMISKINAN				
Method: Least Squares				
Date: 11/29/23 Time: 21:04				
Sample: 2012 2022				
Included observations: 11				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.07084	3.824441	7.862805	0.0000
DAU	-2.43E-08	1.43E-08	-1.696930	0.1281
PAD	4.22E-08	5.79E-08	0.729042	0.4868
R-squared	0.304367	Mean dependent var		23.17545
Adjusted R-squared	0.130459	S.D. dependent var		1.457288
S.E. of regression	1.358909	Akaike info criterion		3.678243
Sum squared resid	14.77307	Schwarz criterion		3.786759
Log likelihood	-17.23033	Hannan-Quinn criter.		3.609838
F-statistic	1.750157	Durbin-Watson stat		0.824028
Prob(F-statistic)	0.234165			

Berdasarkan hasil uji t dan tingkat signifikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pengaruh Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan. H_1 Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa variabel pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t-statistic sebesar 1.423780 dan nilai probability sebesar $0.729042 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan.
- Pengaruh Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan. H_2 Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa variabel dana alokasi umum memiliki nilai t-statistic sebesar -1.696930 dan nilai probability sebesar $0.1281 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan.

Uji F

R-squared	0.304367	Mean dependent var	23.17545
Adjusted R-squared	0.130459	S.D. dependent var	1.457288
S.E. of regression	1.358909	Akaike info criterion	3.678243
Sum squared resid	14.77307	Schwarz criterion	3.786759
Log likelihood	-17.23033	Hannan-Quinn criter.	3.609838
F-statistic	1.750157	Durbin-Watson stat	0.824028
Prob(F-statistic)	0.234165		

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai F-statistik sebesar 1.750157 dengan probabilitas $0.234165 > \alpha = 0.05 \%$, artinya variabel Pendapatan Asli Daerah dan dana alokasi umum secara simultan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel kemiskinan.

Koefisien Determinasi

R-squared	0.304367	Mean dependent var	23.17545
Adjusted R-squared	0.130459	S.D. dependent var	1.457288

S.E. of regression	1.358909	Akaike info criterion	3.678243
Sum squared resid	14.77307	Schwarz criterion	3.786759
Log likelihood	-17.23033	Hannan-Quinn criter.	3.609838
F-statistic	1.750157	Durbin-Watson stat	0.824028
Prob(F-statistic)	0.234165		

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 30,43%, artinya sebesar 30,43% variabel dependen yaitu kemiskinan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Sedangkan sisanya sebesar 69,57% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan secara empiris tentang bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap kemiskinan pada Kabupaten 2012-2022. Berdasarkan pengujian menggunakan model regresi diketahui bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai t-statistic sebesar 0.729042 dan nilai probability sebesar $0.4868 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan dimana H_1 ditolak. Variabel dana alokasi umum memiliki nilai t-statistic sebesar -1.696930 dan nilai probability sebesar $0.1281 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum memiliki hubungan yang negatif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemiskinan. Maka dari itu H_2 ditolak. Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai F-statistik sebesar 1.750157 dengan probabilitas $0.234165 > \alpha = 0.05$ %, artinya variabel Pendapatan Asli Daerah dan dana alokasi umum secara simultan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel kemiskinan. diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 30,43%, artinya sebesar 30,43% variabel dependen yaitu kemiskinan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Sedangkan sisanya sebesar 69,57% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Saran: Terkait dengan bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemiskinan di Nias Barat, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan serta memperkuat pendapatan asli daerah dengan meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan sektor ekonomi lokal, dan meningkatkan efisiensi pajak. Selain itu pemerintah juga perlu mengoptimalkan penggunaan dana alokasi umum dengan memprioritaskan program-program yang mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasann untuk memastikan keefektivitasan dan keefisiensi an penggunaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Indra Maipita, (2014) "Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan". *UPP STIM YKPN*, Yogyakarta
- Istimal Imal. (2012). "Dampak Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Kemiskinan Di Kota Tangerang". *Jurnal Liquidity*. 1(1)
- Mahfudh, Haeruddin Saleh, (2022). "Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah". *PUSTAKA ALMAIDA*, Sulawesi Selatan
- Nurrizqi Aina Faiza, Dkk, (2023). " Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019". *Journal of Law, Administration, and Social Science*. 3(23)
- Paseki Greri Meilen, Dkk, (2014). "Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 14(3)

- Rorong Pingkan Ita, Dkk. (2021). "Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado". *Jurnal EMBA*. 2303-1174
- Syahidin, M. Jalil Abd. (2020). "Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Tengah". *Gajah Putih Journal of Economics Review (GPJER)*. 2(1)
- Wijaya Nawari Diana, Dkk. (2018). "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016". *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 2(1)